



PEMERINTAH
KABUPATEN
PONOROGO

PONO
ROGO
HEBAT

RLPPD

RINGKASAN LAPORAN
PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN PONOROGO
2025



JL. ALOON-ALOON UTARA NOMOR 9, KAB. PONOROGO
TELP. (0352) 481262, 481003, 481146
FAX. (0352) 481484



RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2025

I. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

II. Gambaran Umum

Kabupaten Ponorogo terdiri dari 21 Kecamatan yang meliputi Kecamatan Ngrayun, Slahung, Bungkal, Sambit, Sawoo, Sooko, Pudak, Pulung, Mlarak, Siman, Jetis, Balong, Kauman, Jambon, Badegan, Sampung, Sukorejo, Ponorogo, Babadan, Jenangan, dan Ngebel. Kabupaten Ponorogo terletak pada 111°7' hingga 111°52' Bujur Timur dan 7°49' hingga 8°20' Lintang Selatan dengan luas wilayah sebesar 141.819,12 hektar atau 1.418,19 km². Adapun batas administrasi Kabupaten Ponorogo meliputi :

- Sebelah Utara : Kabupaten Magetan, Kabupaten Madiun, dan Kabupaten Nganjuk
- Sebelah Timur : Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Trenggalek
- Sebelah Selatan : Kabupaten Pacitan
- Sebelah Barat : Kabupaten Pacitan dan Kabupaten Wonogiri (Provinsi Jawa Tengah)

Jumlah penduduk Kabupaten Ponorogo sampai pertengahan tahun 2025 adalah 979.992 jiwa yang terdiri dari laki-laki sejumlah 486.452 jiwa dan Perempuan sejumlah 493.540 jiwa.

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Ponorogo Tahun 2025-2029, visi Pemerintah Kabupaten Ponorogo adalah **“Mewujudkan Ponorogo Hebat (Harmonis, Elok, Bergas, Amanah dan ber-Takwa)”**.

Untuk mewujudkan visi dimaksud, maka dirumuskan 4 (empat) misi yaitu:

1. Misi Kesatu : pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial;
2. Misi Kedua : transformasi ekonomi dalam rangka penguatan UMKM, Koperasi, BUMD dan BUMDes melalui riset inovasi, implementasi ekonomi hijau, transformasi digital, integrasi ekonomi wilayah serta peningkatan produktivitas tenaga kerja;
3. Misi Ketiga : penguatan ketahanan sosial, budaya dan ekologi;
4. Misi Keempat : mewujudkan tata kelola pemerintahan yang amanah, tangkas dan responsif;
5. Misi Kelima : pemenuhan dan peningkatan kualitas infrastruktur dengan pendekatan konektivitas untuk mendukung kawasan strategis dan pemerataan pembangunan;

III. Capaian Kinerja Makro

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro meliputi indeks pembangunan manusia, angka kemiskinan, angka pengangguran, pertumbuhan ekonomi, PDRB per kapita, dan ketimpangan pendapatan.

Capaian Kinerja Makro menggunakan indikator kinerja makro sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2025	Perubahan	Laju Kinerja (%)
1.	Indeks Pembangunan Manusia	73,70	74,65	0,95	1,29
2.	Persentase Penduduk Miskin	9,11	8,86	-0,25	-2,74
3.	Angka Pengangguran (TPT)	4,19	3,85	-0,34	-8,11
4.	Pertumbuhan Ekonomi	4,74	5,37	0,63	13,29
5.	PDRB Per Kapita ADHB	28,09	30,01	1,92	6,84
6.	Ketimpangan Pendapatan	0,326	0,329	0,003	0,92

Sumber data: BPS Kabupaten Ponorogo Tahun 2026

IV. Ringkasan Capaian Kinerja Urusan Pelayanan Dasar

Capaian Kinerja Urusan Pelayanan Dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yang disampaikan dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Urusan	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja (%)	
		2024	2025
Pendidikan	Persentase anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan	87,52	84,75
	Persentase anak usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	n/a	93,64
	Persentase anak usia 7-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	13,29	16,87
	Persentase toilet Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dalam kondisi baik	n/a	35,96
	Persentase Ruang Kelas Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dalam kondisi baik	n/a	33,86
Kesehatan	Persentase angka kematian ibu	n/a	0,07
	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	n/a	7,51
	Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	100	100
	Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar	100	100
	Persentase pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	100	100
	Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100	100
	Persentase pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar	82,77	100
	Persentase pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar	73,56	100
	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	71,07	100
	Persentase pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar	100	100
	Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar	100	100
Persentase pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa berat sesuai standar	100	100	

Urusan	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja (%)	
		2024	2025
	Persentase pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis sesuai standar	100	100
	Persentase pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) sesuai standar	100	100
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persentase kondisi irigasi kewenangan kabupaten/kota	n/a	50,44
	Persentase kemandapan jalan kabupaten/kota	69,76	68,98
	Persentase peningkatan jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap jumlah penduduk di kabupaten/kota	86,15	86,27
	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	85,44	95,35
	Persentase luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian dan mitigasi banjir	4,96	4,96
	Persentase peningkatan perlindungan kawasan permukiman sepanjang pantai kewenangan kabupaten/kota	-	-
	Persentase kepatuhan Persetujuan Bangunan Gedung kabupaten/Kota	100	100
	Persentase Persetujuan Bangunan Gedung untuk masyarakat berpenghasilan rendah	n/a	-
	Persentase tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	86,39	79,58
		Persentase penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang berdasarkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sudah diterbitkan di kabupaten/kota	n/a
Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh rumah layak huni	n/a	100
	Persentase luas kawasan permukiman kumuh di bawah 10 Ha yang ditangani	n/a	100
	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani	n/a	4,93
	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	n/a	-
Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase dokumen kebencanaan yang telah ditetapkan dan masih berlaku	n/a	33,33
	Persentase penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja	100	100
	Persentase peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang ditegakkan	100	100
	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100	100
	Persentase jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	100
	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	79	88,89
Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	99,75	100
	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	99,75	100
	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	99,75	100

Urusan	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja (%)	
		2024	2025
	Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	99,75	100
	Persentase korban bencana alam, sosial dan/atau non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten/kota	100	100
	Persentase penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	n/a	100

V. Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2024

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 79A/LHP/XVIII.SBY/05/2025 tanggal 23 Mei 2025, Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2024, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2024, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan. dengan opini **Wajar Tanpa Pengecualian dengan Penekanan Suatu Hal**.

VI. Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2025 (*Un-Audited*)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada hakekatnya merupakan instrumen kebijakan yang dipakai sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Realisasi pencapaian target kinerja keuangan Pemerintah Daerah merupakan salah satu ukuran dalam rangka menjaga konsistensi pelaksanaan APBD Kabupaten Ponorogo Tahun 2025 sebagai instrumen dalam pencapaian berbagai target pembangunan daerah. Adapun realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2025 (*Un-Audited*) dapat dijelaskan pada tabel berikut :

1. Pendapatan Daerah

(dalam Rupiah)

No	Jenis Pendapatan	Anggaran	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
PENDAPATAN DAERAH		2.525.706.088.657,60	2.422.137.372.998,21	95,90	2.459.752.144.115,27
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	508.640.160.657,60	472.811.099.210,21	92,96	379.425.932.137,27
1.1	Pajak daerah	212.816.090.703,00	220.051.359.914,40	103,40	132.624.031.337,00
1.2	Retribusi Daerah	284.898.812.497,44	236.916.080.851,60	83,16	233.562.254.492,48
1.3	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	2.456.267.457,16	1.290.948.657,16	52,56	1.283.367.866,44
1.4	Lain-lain PAD yang Sah	8.468.990.000,00	14.552.709.787,05	171,84	11.956.278.441,35
2.	PENDAPATAN TRASFER	2.017.065.928.000,00	1.949.326.273.788,00	96,64	2.080.326.211.978,00
2.1	Pendapatan transfer pemerintah pusat	1.893.200.712.000,00	1.813.384.384.838,00	95,78	1.877.197.801.330,00
2.2.	Pendapatan transfer antar daerah	123.865.216.000,00	135.941.888.950,00	109,75	203.128.410.648,00
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PENDAPATAN		2.525.706.088.657,60	2.422.137.372.998,21	95,90	2.459.752.144.115,27

Sumber : LRA tahun 2024 audited dan LRA tahun 2025 unAudited per 13 januari 2026

2. Belanja Daerah

(dalam Rupiah)

No	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
BELANJA DAERAH		2.658.109.387.796,84	2.382.564.997.544,23	89,63	2.438.221.649.521,27
1	BELANJA OPERASI	1.835.051.629.214,25	1.736.276.532.781,20	94,62	1.749.655.782.422,27
1.1	Belanja Pegawai	1.166.516.151.679,59	1.128.302.736.803,60	96,72	1.085.848.064.396,00
1.2	Belanja Barang dan jasa	589.853.224.923,66	534.065.338.509,39	90,54	516.724.473.989,27
1.3	Belanja Bunga	8.930.748.611,00	5.933.015.830,21	66,43	7.013.084.417,00
1.4	Belanja Subsidi	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	79.850.000,00
1.5	Belanja Hibah	62.564.244.000,00	61.076.677.638,00	97,62	131.315.302.420,00
1.6	Belanja Bantuan Sosial	7.167.260.000,00	6.878.764.000,00	95,97	8.675.007.200,00
2.	BELANJA MODAL	380.483.019.395,93	258.693.138.490,96	67,99	217.857.329.844,00
2.1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	71.593.642.759,06	63.872.770.726,00	89,22	70.346.944.520,00
2.2	Belanja Modal gedung dan Bangunan	69.571.752.407,87	67.793.976.367,96	97,44	74.560.669.279,00
2.3	Belanja Modal jalan, jaringan dan irigasi	230.253.570.887,00	122.714.099.722,00	53,30	68.127.310.095,00
2.4	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	8.459.053.342,00	3.870.413.675,00	45,75	4.822.405.950,00
2.5	Belanja Modal Aset Lainnya	605.000.000,00	441.878.000,00	73,04	0,00
3	BELANJA TAK TERDUGA	11.467.014.701,66	8.009.328.500,00	69,85	3.398.746.694,00
3.1	Belanja Tak Terduga	11.467.014.701,66	8.009.328.500,00	69,85	3.398.746.694,00
4	BELANJA TRASFER	431.107.724.485,00	379.585.997.772,07	88,05	467.309.790.561,00
4.1	Belanja Bagi Hasil	22.777.802.035,00	22.777.802.035,00	100,00	3.829.710.696,00
4.2	Belanja Bantuan Keuangan	408.329.922.450,00	356.808.195.737,07	87,38	463.480.079.865,00
	JUMLAH BELANJA	2.658.109.387.796,84	2.382.564.997.544,23	89,63	2.438.221.649.521,27

Sumber : LRA tahun 2024 audited dan LRA tahun 2025 unAudited per 13 januari 2026

1. Pembiayaan Daerah

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
PEMBIAYAAN DAERAH		132.403.299.139,24	45.546.457.432,24	34,40	65.971.161.278,24
1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	187.801.655.872,24	87.501.655.872,24	46,59	93.704.700.449,24
1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	87.501.655.872,24	87.501.655.872,24	100,00	78.230.715.449,24
1.2	Penerimaan Pinjaman Daerah	100.000.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000.000,00
1.3	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	300.000.000,00	0,00	0,00	473.985.000,00
2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	55.398.356.733,00	41.955.198.440,00	75,73	27.733.539.171,00
2.1	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	55.398.356.733,00	41.955.198.440,00	75,73	27.733.539.171,00
	PEMBIAYAAN NETTO	132.403.299.139,24	45.546.457.432,24	34,40	65.971.161.278,24
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN PENGANGGARAN	0,00	85.118.832.886,22	0,00	87.501.655.872,24

Sumber : LRA tahun 2024 audited dan LRA tahun 2025 unAudited per 13 januari 2026

VII. Inovasi Daerah

PELAKSANA	INOVASI	DESKRIPSI
Sekretariat Daerah	SIELOK	Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Elektronik Lokal, platform berbasis web untuk memfasilitasi pelaporan pengadaan barang dan jasa Pemerintah dengan integrasi data dari SIPD dan SIRUP dari LKPP.
Sekretariat DPRD	e-PERSIDANGAN	Pengelolaan data Anggota DPRD, pengelolaan anggaran dan arsip rapat DPRD Kabupaten Ponorogo.
Inspektorat	eS KOPI PAHIT	Sistem Konsultasi Pengawasan Internal dan Pemeriksaan yang Humanis Berbasis IT sebagai sarana konsultasi OPD dan sarana bagi APIP melakukan pemeriksaan atas kinerja dan pelaksanaan kegiatan pada OPD.
	SUPER GRATIFIKASI	Aplikasi yang memudahkan ASN dalam penyampaian pernyataan tentang penolakan, penerimaan dan/atau pemberian gratifikasi.
Dinas Pendidikan	PPDB	Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru secara online sehingga mempermudah pelayanan kepada masyarakat.
Disbudparpora	PEMUDA HEBAT	Program dukungan bagi komunitas pemuda penggerak masyarakat dari berbagai bidang kehidupan masyarakat terutama bidang seni dan budaya
	E – TICKETING	Upaya Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ponorogo untuk meningkatkan keefektifan, efisiensi dan transparansi pemungutan retribusi masuk Telaga Ngebel.
Dinkes	SI GESIT	Aplikasi layanan panggilan kasus gawat darurat medis berbasis android,
Dinsos P3A	WA PBID	Pelayanan Usulan PBI-PBID KIS Melalui WA.
DPPKB	SILISA	Intervensi penurunan stunting baik intervensi sensitif maupun intervensi spesifik, antara lain kerjasama dengan toko setempat untuk penyediaan makanan tambahan bagi keluarga berisiko stunting.
Dinas Dukcapil	TEPUK BERES	Fasilitasi pengiriman dokumen adminduk masyarakat desa melalui kerjasama Disdukcapil dengan BUMDesa di Kabupaten Ponorogo guna memberikan pelayanan yang cepat dan dekat kepada masyarakat desa.
Dinas PMD	PKK Akademia	Pemberdayaan perempuan dalam perannya meningkatkan kesejahteraan keluarga khususnya UMKM era digital.
	GADUNG MELATI	Pusat oleh-oleh produk-produk khusus UMKM ponorogo.
Satpol PP	SAPA POL PP	Call Centre untuk menerima dan melayani aduan dari Masyarakat terkait ketertiban umum dan ketentraman Masyarakat.
	SIPEKKA	Sistem layanan pengaduan kejadian kebakaran dan penyelamatan di Satuan Polisi Pamong Praja melalui aplikasi WhatsApp dengan nomor pengaduan 082160063113 dan 085176963113.
DPMPSTP	PISC	Ponorogo Investment Service Center, sebuah aplikasi berbasis website berisi informasi terbuka mengenai potensi investasi yang ada di Kabupaten Ponorogo.
	SPRINTER	Pembaharuan dari aplikasi SIJITU yang merupakan aplikasi perizinan non berusaha yang dapat diakses secara online.
Diskominfo	SADAP	Aplikasi yang terintegrasi dengan Satu Data Jawa Timur guna menciptakan data yang berkualitas dan mudah diakses.
Dinas Perdagkum	Satu Desa Satu KIM	Inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat di desa-desa tentang informasi dan teknologi.
	Sikoperwani	Sistem Informasi Pelaporan Koperasi Wanita, untuk melakukan pelaporan perkembangan pada koperasi wanita di Kabupaten Ponorogo.
Disnaker	SILAT HEBAT	Aplikasi berbasis web sebagai sarana laporan dokumen Data Kelembagaan dan Pelatihan Kerja dan publikasi informasi tentang dokumen elektronika Data Kelembagaan dan Pelatihan Kerja.
BPPKAD	SIMASET	Sistem informasi untuk pencatatan dan manajemen data aset dinas
	SIPANDA UNIK	Sistem informasi dan pelayanan pajak daerah berbasis NIK yang mendukung pembayaran online melalui QRIS atau VA.

PELAKSANA	INOVASI	DESKRIPSI
DPUPKP	SIBAPER	Sistem informasi manajemen data perumahan, bangunan gedung, RTLH dan permohonan perizinan site plan perumahan.
	SIBESTI	Sistem informasi manajemen administrasi UPTD IPALD dan pelayanan sedot tinja.
Dinas Perhubungan	SI TANJIDOR	Aplikasi untuk mengelola administrasi pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor meliputi pendaftaran, pembayaran retribusi, penyimpanan data hasil uji, pencetakan hasil uji kendaraan bermotor, dll.
	ACS	Aplikasi untuk memudahkan pelajar dan masyarakat Ponorogo mengetahui posisi kendaraan ACS secara real-time.
	ePJU	Aplikasi untuk mengelola data alat listrik, pengadaan alat listrik, stok alat listrik, permintaan alat listrik harian, dll.
	eParkir	Aplikasi untuk mengelola data juru parkir, data personel, SPK & SPT, titik parkir, penerimaan PAD, dll.
	eTrayek	Aplikasi untuk mengelola data angkutan, data perusahaan, izin trayek, izin usaha, dll.
Dipertahankan	PAK TANI	Aplikasi untuk memudahkan penilaian kelas kemampuan kelompok tani secara online.
	SULUH TANI	Media informasi dalam bentuk channel Youtube yang menyuguhkan tayangan yang informatif, edukatif, dan inspiratif bagi para petani.
	SIDAT IKAN PURBA	Sistem berbasis aplikasi untuk memantau dan mengevaluasi data bantuan pemerintah yang didasarkan pada data riil di masing-masing kecamatan yang kelompok taninya menerima bantuan pemerintah.
	SIPBUNDA	Sistem pelaporan adanya serangan hama penyakit tanaman perkebunan oleh petani perkebunan melalui mantri perkebunan. Aplikasi ini terkoneksi melalui email pelapor dengan penerima data.
	SKM ONLINE	Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat melalui link google form atau mengisi form yang telah disematkan pada website.
Dinas Perpus Arsip	E-Pustaka Wengker	Perpustakaan digital berbasis android yang dapat didownload melalui playstore.
	Parade Merak	Parade merak adalah Pelaksanaan Restorasi Arsip Desa Menjaga Hak Rakyat.
Bakesbangpol	SIALOM	Sebuah sistem untuk memberikan informasi kepada masyarakat terkait data LSM dan Ormas di Ponorogo secara akurat.
Dinas LH	Si-Pemuda Wengker	Media sebagai sarana masyarakat yang ingin melakukan peminjaman lokasi Wengker Park untuk berbagai event.
	Getuk Golan	Kegiatan dongeng/bercerita, bermain kuis, bermain tab edukasi dan membaca dengan metode berkeliling melayani masyarakat.
BKPSDM	Simas Hebat	Aplikasi informasi kepegawaian yang memungkinkan semakin berkualitasnya layanan kepegawaian dan penyajian data lebih akurat.
	Presensi Jathilan	Aplikasi untuk persensi ASN dengan pencatatan kehadiran kerja yang akurat dan obyektif memanfaatkan jaringan internet.
Bappeda Litbang	SI-dalev	Sistem Informasi Pengendalian dan Evaluasi pembangunan daerah berbasis website, dalam menyampaikan dan mengevaluasi hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) setiap triwulan.
	SIAP Grak	SIAP Grak adalah sistem informasi yang digunakan Bappeda Litbang untuk melaksanakan monitoring evaluasi program prioritas Kabupaten Ponorogo.
BPBD	SIPBANTU	Aplikasi untuk melaporkan kejadian bencana dilengkapi foto dan laporan kejadian yang akan tersampaikan ke Pusdalops BPBD.
	SIEMERY	Sistem terintegrasi dari beberapa aplikasi untuk mengirim ringkasan medis elektronik kepada pasien/pemohon RSUD Dr. Harjono S.

VIII. Penghargaan yang diterima oleh Kabupaten Ponorogo pada Tahun 2025

Pelaksanaan pembangunan dan pencapaian Pemerintah Kabupaten Ponorogo merupakan hasil kerjasama dan sinergi dari semua pihak (*stakeholder*) sesuai dengan kewenangan tugas dan kompetensi masing-masing. Kerjasama yang baik dengan seluruh komponen masyarakat dalam upaya memberikan pelayanan terbaik tersebut telah mendapatkan apresiasi antara lain sebagai berikut :

1. Ponorogo menjadi bagian dari *UNESCO Creative Cities Network (UCCN)* atau Jejaring Kota Kreatif UNESCO kategori *Crafts and Folk Art* pada Peringatan *World Cities Day 2025* tanggal 31 Oktober 2025;
2. Penghargaan Pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa/Kelurahan di Kabupaten Ponorogo yang diberikan oleh Kementerian Hukum Republik Indonesia di Surabaya pada tanggal 11 Desember 2025;
3. Penghargaan Mitra Kerja Terbaik yang diberikan oleh Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Ponorogo kepada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Ponorogo dalam acara Refleksi Akhir Tahun pada tanggal 10 Desember 2025;
4. Penghargaan 10 Terbaik Pemerintah Daerah Tingkat Provinsi Jawa Timur yang Mengoptimalkan DBHCHT untuk Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan Tahun 2025 yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Jawa Timur di Surabaya pada tanggal 3 Desember 2025;
5. Penghargaan Kabupaten dengan kategori Menuju Informatif yang diterima dalam Malam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik "*KI Awards*" dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur di Bojonegoro pada tanggal 29 November 2024;
6. Juara 1 Nasional Apresiasi GTK (Guru dan Tenaga Kependidikan) Tahun 2025 kategori Pendidikan Anak Usia Dini Transformatif yang diberikan kepada Annis Noviana Mahidah, S.Pd guru TB Adituka Sejahtera Kauman oleh Kemendikdasmen di Jakarta pada tanggal 27 November 2025;
7. Penghargaan Terbaik IV dalam ajang *Policy Innovation 2025* dari Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Timur yang diberikan kepada 3 ASN dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Ponorogo di Surabaya pada tanggal 25 November 2025;
8. Penghargaan atas Keberhasilan Pengukuran Indeks Harmoni (Ihal) Tahun 2025 yang diterima Kabupaten Ponorogo tanggal 17 November 2025 dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
9. Terbaik III Pencatatan dan Pelaporan SIGA Tahun 2025 dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN Perwakilan Provinsi Jawa Timur yang diserahkan pada tanggal 13 November 2025 di Sidoarjo;
10. Penghargaan Terbaik I kategori Media Sosial dan Terbaik III kategori Video Kreatif yang diterima Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Ponorogo dalam ajang *Jatim Public Relation Award (JPRA) 2025* di Malang pada tanggal 8 November 2025;
11. Penghargaan Kategori Konsolidasi Ekosistem Kreatif Berbasis Budaya Lokal Bertaraf Global yang diraih Pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam ajang Anugerah Inovasi Pembangunan Terpuji *detikJatim Awards 2025* di Malang pada tanggal 5 November 2025;
12. Juara Harapan I *East Java Tourism Marketing Award 2025* dalam kategori *Best Social Influence* yang diterima Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ponorogo pada tanggal 15 Oktober 2025 di Surabaya;
13. Predikat *Transformative Leader* yang disematkan kepada Bupati Ponorogo dalam ajang *Radar Madiun Awards 2025* yang diselenggarakan di Madiun pada tanggal 26 September 2025;
14. Medali Perunggu Ajang *World Skills ASEAN Competition* yang diraih oleh Dua Alumnus SMKN 1 Ponorogo di Filipina tanggal 25-30 Agustus 2025;
15. Penyaji Terbaik *Virtual Tour* dan Juara Penyaji *Virtual Tour* Eksotis yang diraih Desa Pupus Kecamatan Ngebel dalam Festival Dewi Cemara 2025 di Bondowoso pada tanggal 22-25 Agustus 2025;
16. Penghargaan Radar Madiun *Education Award 2025* kategori *Education Changemaker* untuk Inovasi Program Tahfidz Quran pada tanggal 25 Juni 2025;

17. Predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan Penekanan Suatu Hal bagi Pemerintah Kabupaten Ponorogo atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang diserahkan Ketua Perwakilan BPK Provinsi Jawa Timur di Kantor BPK Provinsi Jawa Timur pada tanggal 27 Mei 2025;
18. Penghargaan Festival Nasional Reog Ponorogo dan Grebeg Suro dalam 110 Event Terpilih Karisma Event Nusantara 2025 dari Kementerian Pariwisata Republik Indonesia pada tanggal 3 Februari 2025;

IX. Penutup

Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2025 disusun sebagaimana diatur dalam Pasal 69 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa "Kepala Daerah wajib menyampaikan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah" yang disusun berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Ponorogo Tahun 2025 mencakup hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Berbagai keberhasilan yang dicapai dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Tahun Anggaran 2025 patut disyukuri, mengingat pencapaiannya diraih atas kerjasama dan partisipasi semua pihak, baik jajaran Eksekutif maupun Legislatif, serta masyarakat secara luas. Hasil yang telah dicapai mengindikasikan adanya komitmen yang kuat dari seluruh elemen Pemerintahan Daerah yang dapat dijadikan pondasi kokoh untuk meraih kinerja yang lebih optimal di masa mendatang.

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, tentu saja masih terdapat kekurangan yang perlu diperbaiki sehingga dengan disampaikannya RLPPD ini, masukan dari masyarakat dalam memberikan pengawasan terhadap jalannya roda pemerintahan sangat diharapkan sebagai bahan pertimbangan untuk penyelenggaraan pemerintahan menuju ke arah yang lebih baik.

Demikian penyampaian RLPPD Kabupaten Ponorogo Tahun 2025, diiringi harapan semoga di tahun-tahun mendatang, keberhasilan senantiasa mengiringi segala upaya dan perjuangan kita demi menuju Ponorogo HEBAT.

Ponorogo, 26 Maret 2026

PI. Bupati Ponorogo

Lisdyarita



PONO
ROGO
HEBAT

SINGA UDRO

KAJAJO